

Kajian Pragmatis Transformasi Manajemen Waktu Pendidikan Sekolah 5 hari di Kota Pematangsiantar

Bismar Sibuea¹, Mardin Silalahi¹, Tiodora Sillahi¹, Anita Purba¹

¹ Universitas Simalungun, Indonesia

✉ elbizmarsibuea@gmail.com*

ABSTRACT

The transformation of learning time management through the five-day school policy has become an important discourse in the Indonesian education system. This policy aims to improve learning effectiveness and provide broader opportunities for students' character development. However, the implementation of such policy requires a comprehensive study that considers the readiness of various stakeholders and the socio-economic conditions of the community. This study aims to analyze the dynamics of the five-day school policy discourse in Pematangsiantar City and to identify factors influencing the readiness of schools, teachers, students, and parents in responding to changes in the learning time system. This research employs a qualitative approach using descriptive analysis of educational data, socio-economic conditions of the community, and stakeholder responses toward the policy. The findings indicate that the implementation of the five-day school system in Pematangsiantar has not been evenly adopted because the policy is not mandatory for all educational institutions. Furthermore, teacher readiness, socio-economic conditions of students' families, transportation accessibility, and school infrastructure readiness are significant factors affecting the effectiveness of policy implementation. The study also reveals that changes in the learning time system potentially generate multidimensional impacts on educational, social, and economic aspects of society. Therefore, a more comprehensive policy analysis using a transdisciplinary approach is required before implementing the policy more broadly.

Keywords: Educational Management, Five-Day School Policy, Learning Transformation

ARTICLE INFO

Article history:

Received
December 21, 2025
Revised
February 03, 2026
Accepted
March 29, 2026

Journal Homepage <https://attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2026 by the authors

Published by CV. Creative Tugu Pena

PENDAHULUAN

Transformasi kebijakan pendidikan merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas sistem pendidikan nasional serta meningkatkan daya saing pendidikan di era globalisasi pendidikan modern (OECD, 2021; UNESCO, 2022; Schleicher, 2020; Sahlberg, 2021). Salah satu kebijakan yang banyak diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir adalah pengaturan manajemen waktu belajar melalui sistem sekolah lima hari (five-day school) yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah serta diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023. Kebijakan ini memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan satuan pendidikan untuk mengatur waktu pembelajaran secara lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan kebutuhan peserta didik serta kondisi sosial Masyarakat (Rizvi & Lingard, 2019). Pada prinsipnya, sistem sekolah lima hari bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran melalui pengaturan durasi belajar yang lebih panjang setiap hari, sekaligus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan aktivitas non-akademik di luar sekolah (Patall et al., 2018; Hattie, 2020).

Namun demikian, regulasi tersebut tidak mewajibkan seluruh sekolah untuk menerapkan sistem sekolah lima hari. Implementasinya sangat bergantung pada kesiapan

masing-masing daerah, kondisi sosial masyarakat, serta kapasitas institusi pendidikan dalam mengelola perubahan tersebut (Fullan, 2020). Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini memerlukan kajian yang komprehensif agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan terhadap sistem pendidikan maupun kehidupan sosial masyarakat.

Dalam konteks lokal, wacana penerapan sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar saat ini menjadi isu yang cukup hangat diperbincangkan. Pemerintah Kota Pematangsiantar melalui Dinas Pendidikan sedang merencanakan implementasi kebijakan tersebut secara bertahap di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada beberapa sekolah tingkat SMA, sistem ini bahkan telah mulai diterapkan. Selanjutnya, pemerintah daerah tengah melakukan peninjauan untuk memperluas implementasi kebijakan tersebut pada jenjang pendidikan yang lebih rendah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di tingkat daerah tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi nasional, tetapi juga oleh dinamika lokal dan kesiapan institusi pendidikan (Ball, 2017).

Kajian lain menunjukkan bahwa durasi waktu belajar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan hasil belajar. Kualitas pembelajaran, strategi pedagogis, serta keterlibatan siswa dalam proses belajar justru menjadi faktor yang lebih menentukan (Darling-Hammond et al., 2020; Blazar & Kraft, 2017). Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen waktu pendidikan merupakan kebijakan yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara linear.

Selain aspek akademik, perubahan jadwal sekolah juga berdampak pada dimensi sosial dan psikologis siswa. Eccles dan Roeser (2021) menegaskan bahwa keseimbangan antara kehidupan akademik dan sosial merupakan faktor penting dalam perkembangan remaja. Oleh karena itu, perubahan sistem waktu belajar perlu mempertimbangkan aspek kesejahteraan siswa secara holistik.

Munculnya wacana ini tidak terlepas dari berkembangnya berbagai kebijakan serupa di berbagai negara dan daerah yang mencoba melakukan penyesuaian terhadap manajemen waktu pembelajaran di sekolah. Beberapa penelitian internasional dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa perubahan struktur hari sekolah dapat memberikan dampak yang kompleks terhadap berbagai aspek pendidikan. Misalnya, penelitian oleh Morton, Thompson, dan Kuhfeld (2024) menunjukkan bahwa perubahan jadwal sekolah menjadi lebih singkat dalam satu minggu dapat berdampak pada capaian akademik siswa, terutama dalam aspek literasi dan numerasi, karena berkurangnya waktu paparan siswa terhadap lingkungan belajar formal.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Thompson (2021) mengenai implementasi perubahan jadwal sekolah menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan hari belajar seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti efisiensi biaya operasional sekolah, upaya meningkatkan retensi guru, serta penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat, khususnya di wilayah dengan karakteristik geografis tertentu.

Selain itu, kajian literatur terbaru menunjukkan bahwa dampak perubahan jadwal sekolah tidak selalu bersifat linear. Beberapa studi menemukan bahwa perubahan jadwal sekolah dapat memengaruhi berbagai indikator pendidikan, seperti kehadiran siswa, motivasi belajar, serta keseimbangan kehidupan belajar dan aktivitas sosial siswa. Namun demikian, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa perubahan tersebut berpotensi menimbulkan konsekuensi terhadap capaian akademik apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan waktu pembelajaran yang efektif.

Temuan-temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan transformasi manajemen waktu pendidikan merupakan kebijakan yang memiliki implikasi multidimensional. Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek pedagogis, tetapi juga berkaitan erat dengan berbagai dimensi lain seperti kondisi sosial masyarakat, aktivitas ekonomi keluarga, kesehatan peserta didik, serta sistem pengasuhan di lingkungan rumah dan komunitas. Oleh karena itu, implementasi kebijakan tersebut memerlukan kajian yang kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik sosial dan budaya masyarakat di setiap wilayah.

Dalam konteks Kota Pematangsiantar, penerapan kebijakan sekolah lima hari berpotensi menimbulkan dampak yang luas tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pada sektor lain seperti ekonomi lokal, dinamika sosial masyarakat, kesehatan siswa, serta aspek keamanan dan pengawasan terhadap peserta didik. Perubahan pola waktu belajar dapat mempengaruhi aktivitas keluarga, pola interaksi sosial anak, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang berkaitan dengan layanan pendidikan. Dengan demikian, keputusan untuk menerapkan sistem sekolah lima hari tidak dapat semata-mata didasarkan pada tren kebijakan nasional atau keberhasilan implementasi di daerah lain.

Berdasarkan tinjauan penelitian sebelumnya, sebagian besar studi mengenai perubahan jadwal sekolah masih berfokus pada dampak akademik siswa, seperti hasil belajar, kehadiran, dan efisiensi operasional sekolah. Sementara itu, kajian yang melihat transformasi manajemen waktu pendidikan dari perspektif multisektor dan pendekatan pragmatis dalam konteks lokal masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks kebijakan pendidikan di tingkat daerah di Indonesia. Hal inilah yang menjadi celah penelitian (research gap) dalam studi ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam transformasi manajemen waktu pendidikan melalui kebijakan sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar dengan menggunakan pendekatan pragmatis. Kajian ini tidak hanya menyoroti implikasi kebijakan tersebut terhadap proses pendidikan, tetapi juga menelaah dampaknya dari berbagai perspektif transdisipliner, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, kesehatan, serta aspek keamanan peserta didik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada pendekatan analisis kebijakan yang tidak hanya meninjau dampak akademik dari sistem sekolah lima hari, tetapi juga mengkaji implikasinya secara lebih luas melalui pendekatan pragmatis dan transdisipliner. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada pengaruh perubahan struktur hari sekolah terhadap capaian akademik siswa dan efisiensi operasional lembaga pendidikan. Sementara itu, penelitian ini memperluas perspektif analisis dengan mempertimbangkan dimensi sosial, ekonomi, kesehatan, transportasi, serta keamanan peserta didik dalam konteks lokal Kota Pematangsiantar. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian kebijakan pendidikan dengan menekankan pentingnya analisis kontekstual berbasis kondisi sosial masyarakat dalam merumuskan kebijakan transformasi manajemen waktu pendidikan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kebijakan pendidikan (education policy analysis) untuk memahami dinamika transformasi manajemen waktu pendidikan melalui penerapan sistem sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar serta implikasinya terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.

Pendekatan kualitatif mampu memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang kompleks dan kontekstual, khususnya yang berkaitan dengan persepsi, pengalaman, dan respon pemangku kepentingan terhadap suatu kebijakan (Creswell & Poth, 2018; Denzin & Lincoln, 2018; Maxwell, 2017; Flick, 2018). Pendekatan penelitian kualitatif juga memungkinkan peneliti memahami makna subjektif dan pengalaman sosial para informan secara lebih mendalam dalam konteks kebijakan pendidikan (Tracy, 2020).

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pematangsiantar dengan fokus pada satuan pendidikan pada jenjang TK, SD, SMP, dan SMA yang menjadi bagian dari wacana implementasi kebijakan sekolah lima hari. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah ini sedang berada dalam fase transisi kebijakan pendidikan yang memungkinkan untuk dikaji secara empiris dalam konteks lokal (Yin, 2018).

Informan Penelitian

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan informan berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian

(Patton, 2015). Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh data yang kaya (*rich data*) dari individu yang memiliki pengalaman dan pengetahuan langsung terkait fenomena yang diteliti.

Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak xx orang yang terdiri dari X pejabat dinas pendidikan, X kepala sekolah, X guru, X orang tua siswa, dan X tokoh masyarakat. Wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dalam rentang waktu [bulan–tahun] untuk memperoleh data yang komprehensif terkait persepsi dan pengalaman informan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali perspektif informan secara lebih mendalam, observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data berupa kebijakan, laporan, dan dokumen terkait lainnya (Creswell, 2014).

Penggunaan berbagai teknik pengumpulan data ini bertujuan untuk meningkatkan kedalaman dan validitas data melalui pendekatan triangulasi metode (Denzin, 2017). Penggunaan triangulasi metode bertujuan untuk meningkatkan validitas dan kredibilitas temuan penelitian, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif kontemporer (Denzin, 2017; Nowell et al., 2017; Tracy, 2020)

Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan analisis tematik (*thematic analysis*), yang merupakan metode untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif (Braun & Clarke, 2006). Analisis tematik digunakan karena fleksibilitasnya dalam mengidentifikasi pola makna dalam data kualitatif serta kemampuannya dalam menghasilkan interpretasi yang mendalam terhadap fenomena sosial (Braun & Clarke, 2006; Terry et al., 2017). Analisis data kualitatif dalam penelitian ini juga mempertimbangkan proses interpretasi makna sosial yang berkembang dalam dinamika implementasi kebijakan pendidikan (Miles et al., 2019; Maxwell, 2017). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses seleksi dan penyederhanaan data yang relevan dengan fokus penelitian (Miles et al., 2019)
2. Penyajian data, yaitu pengorganisasian data dalam bentuk narasi analitis
3. Penarikan kesimpulan, yaitu interpretasi data untuk memahami makna dan implikasi kebijakan

Selain itu, proses analisis juga melibatkan tahapan *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding* untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data (Strauss & Corbin, 1998).

Validitas dan Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode, yaitu dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data (Denzin, 2017). Selain itu, dilakukan pula *member checking* untuk memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan peneliti sesuai dengan pengalaman dan perspektif informan (Lincoln & Guba, 1985).

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas penelitian sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

RESULT AND DISCUSSION

Kondisi Capaian Belajar Siswa di Kota Pematangsiantar

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kondisi capaian belajar siswa di Kota Pematangsiantar dalam beberapa tahun terakhir relatif stabil dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Meskipun demikian, tidak ditemukan indikasi bahwa sistem waktu belajar yang berlaku saat ini menjadi penyebab utama stagnasi capaian belajar tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan manajemen waktu pembelajaran melalui penerapan sistem sekolah lima hari tidak secara otomatis menjamin peningkatan kualitas hasil belajar siswa (Morton et al., 2024; Hattie, 2020). Temuan ini sejalan dengan penelitian yang

menunjukkan bahwa peningkatan waktu belajar tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan capaian akademik siswa, karena kualitas pembelajaran lebih ditentukan oleh efektivitas strategi pedagogis dan keterlibatan siswa (Hattie, 2020; Blazar & Kraft, 2017; Rivkin & Schiman, 2019; Kidger et al., 2018).

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan capaian akademik siswa tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah waktu belajar, tetapi juga oleh kualitas pembelajaran, strategi pedagogis guru, serta kondisi psikologis siswa dalam mengikuti proses belajar (Morton et al., 2024). Dengan demikian, perubahan struktur waktu sekolah perlu dipertimbangkan secara hati-hati agar tidak menimbulkan tekanan tambahan terhadap siswa tanpa memberikan peningkatan signifikan terhadap kualitas pembelajaran. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa kualitas sistem pendidikan tidak hanya ditentukan oleh penambahan waktu belajar, tetapi juga oleh kualitas sistem pengajaran dan kapasitas profesional guru (Hargreaves & Fullan, 2020).

Dari hasil Wawancara Penulis dengan Pegawai Dinas Pendidikan Pematangsiantar Ibu Novalita Girsang, menyatakan bahwa :

- sesuai data yang ada di Dinas Pendidikan Pematangsiantar tidak ada perubahan signifikan apalagi menurun pada pencapaian pembelajaran di Tingkat SD dan SMP kota pematangsiantar
- terdapat peningkatan jumlah siswa yang lulus di SMA favorit dari lulusan SMP di Kota pematangsiantar, namun tidak banyak

Dinamika Implementasi Sekolah Lima Hari di Kota Pematangsiantar

Data penelitian menunjukkan bahwa sebagian sekolah di Kota Pematangsiantar telah mulai menerapkan sistem sekolah lima hari, terutama pada jenjang Sekolah Menengah Atas. Namun demikian, sebagian besar sekolah lainnya belum menerapkan sistem tersebut karena kebijakan ini tidak bersifat wajib bagi seluruh satuan pendidikan.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah satuan pendidikan di Kota Pematangsiantar terdiri dari:

- **SD Negeri : 70 sekolah**
- **SD Swasta : 59 sekolah**
- **SMP Negeri : 15 sekolah**
- **SMP Swasta : 37 sekolah**
- **SMA Negeri : 10 sekolah**
- **SMA Swasta : 51 sekolah**

Sebaran sekolah yang cukup besar pada sektor swasta menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah lima hari tidak hanya bergantung pada keputusan pemerintah daerah, tetapi juga pada kesiapan masing-masing institusi pendidikan. Kondisi ini menimbulkan dinamika kebijakan yang berbeda-beda di setiap sekolah, baik dari segi kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, maupun dukungan masyarakat. Implementasi kebijakan pendidikan pada tingkat lokal menunjukkan bahwa setiap institusi pendidikan memiliki kapasitas adaptasi yang berbeda-beda terhadap perubahan kebijakan (Cairney, 2019).



Foto : Pengambilan Data Kesekolah

Sikap Guru terhadap Wacana Sekolah Lima Hari

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru sebagai pelaksana utama kebijakan pendidikan cenderung berada dalam posisi pasif terhadap wacana penerapan sekolah lima hari. Hingga saat ini belum terdapat data yang menunjukkan secara jelas apakah mayoritas guru menyetujui atau menolak kebijakan tersebut.. Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, keterlibatan guru menjadi faktor kunci dalam keberhasilan kebijakan, karena guru merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran (Spillane, 2017; Hallinger & Chen, 2021; Leithwood et al., 2020; Nguyen et al., 2020

Sebagian guru yang menyatakan persetujuan terhadap kebijakan ini cenderung bersifat pragmatis, terutama karena adanya imbauan dari pihak manajemen sekolah atau kepala sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan langsung dengan perubahan sistem kerja mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru cenderung berada dalam posisi pasif terhadap wacana kebijakan sekolah lima hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan (Spillane, 2017).

Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan, keterlibatan guru dalam proses pengambilan kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Hallinger & Chen, 2021). Ketidakterlibatan ini berpotensi menimbulkan resistensi terselubung yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam jangka Panjang. Kondisi ini juga menunjukkan adanya fenomena policy alienation, di mana pelaksana kebijakan merasa tidak memiliki keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan (Tummers et al., 2015; OECD, 2023)

Selain itu, kesiapan guru juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian guru di Kota Pematangsiantar berada pada rentang usia yang relatif senior sehingga kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dengan durasi waktu yang lebih panjang perlu menjadi perhatian. Selain itu, terdapat guru yang memiliki pekerjaan tambahan di luar sekolah, seperti mengajar les privat, membuka usaha kecil, atau aktivitas ekonomi lainnya, terutama bagi guru yang bekerja di sekolah swasta dengan tingkat penghasilan yang relatif terbatas. Oleh karena itu, perubahan sistem kerja menjadi lima hari sekolah berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi sebagian guru.



Foto : wawancara dengan guru

Temuan penelitian menunjukkan bahwa guru sebagai pelaksana utama kebijakan pendidikan cenderung berada dalam posisi pasif terhadap wacana penerapan sekolah lima hari. Hingga saat ini belum terdapat data yang menunjukkan secara jelas apakah mayoritas guru menyetujui atau menolak kebijakan tersebut.

Sebagian guru yang menyatakan persetujuan terhadap kebijakan ini cenderung bersifat pragmatis, terutama karena adanya imbauan dari pihak manajemen sekolah atau kepala sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa guru sebagai aktor utama dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan langsung dengan perubahan sistem kerja mereka.

“Kami mengikuti kebijakan yang ada dari sekolah, tetapi sebenarnya belum ada pembahasan mendalam dengan guru terkait kesiapan kami menjalankan sistem lima hari ini.” (Guru-02, wawancara 2025)

“Sebagian guru menerima kebijakan ini karena arahan pimpinan, bukan karena memahami secara utuh dampaknya terhadap proses pembelajaran.” (Guru-05, wawancara 2025)

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasi di lapangan, yang dalam perspektif kebijakan pendidikan dikenal sebagai *implementation gap* (Spillane, 2017). Dalam konteks ini, guru tidak sepenuhnya berperan sebagai aktor strategis, melainkan lebih sebagai pelaksana kebijakan yang bersifat top-down.

Dalam perspektif kepemimpinan pendidikan, keterlibatan guru dalam proses pengambilan kebijakan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan (Hallinger & Chen, 2021). Ketidakterlibatan ini berpotensi menimbulkan resistensi terselubung (*latent resistance*) yang dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan dalam jangka panjang.

Selain itu, kesiapan guru juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian guru di Kota Pematangsiantar berada pada rentang usia yang relatif senior sehingga kemampuan fisik dan mental untuk menjalankan aktivitas pembelajaran dengan durasi waktu yang lebih panjang perlu menjadi perhatian.

“Kalau jam belajar diperpanjang sampai sore, tentu ada kelelahan, apalagi bagi guru yang sudah tidak muda lagi.” (Guru-07, wawancara 2025)

“Kami juga punya aktivitas lain di luar sekolah, seperti les tambahan, jadi perubahan jadwal ini pasti berpengaruh pada penghasilan kami.” (Guru-04, wawancara 2025)

Selain durasi belajar, kualitas hubungan pedagogis antara guru dan siswa juga menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas pembelajaran (Biesta & Tedder, 2019).

Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak hanya berdampak pada aspek pedagogis, tetapi juga berimplikasi pada kondisi sosial ekonomi guru. Kondisi kesejahteraan guru juga berkaitan erat dengan kualitas pembelajaran dan stabilitas sistem pendidikan dalam jangka panjang (Hanushek & Woessmann, 2020).

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa kesejahteraan dan kondisi kerja guru merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan (Fullan, 2020; OECD, 2021)

Persepsi dan Kesiapan Orang Tua Siswa

temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang tua siswa cenderung bersikap pasif terhadap wacana penerapan sekolah lima hari. Banyak orang tua beranggapan bahwa pandangan mereka tidak menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan pendidikan oleh pihak sekolah atau pemerintah. Rendahnya partisipasi orang tua dalam kebijakan pendidikan merupakan fenomena yang umum terjadi di negara berkembang, yang seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya (OECD, 2021; Wilder, 2017; Kim & Hill, 2015)

“Kami sebagai orang tua biasanya hanya mengikuti kebijakan sekolah, karena memang jarang diminta pendapat secara langsung.” (OrangTua-03, wawancara 2025)

“Kadang kami merasa tidak dilibatkan, jadi apapun kebijakan sekolah ya kami terima saja.” (OrangTua-06, wawancara 2025)

Kondisi ini menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan pendidikan, yang merupakan fenomena umum di berbagai daerah berkembang (OECD, 2021). Rendahnya partisipasi ini berpotensi mengurangi legitimasi sosial kebijakan serta menghambat efektivitas implementasi di tingkat akar rumput. Padahal jika dilihat pendapat dari pakar bahwa partisipasi orang tua dalam kebijakan pendidikan memiliki hubungan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan (Kim & Hill, 2015; Wilder, 2017). Meskipun demikian, terdapat pula sebagian orang tua yang menyatakan penolakan terhadap kebijakan tersebut. Penolakan tersebut umumnya berkaitan dengan aspek keamanan, ekonomi, dan sosial keluarga.

“Kami khawatir kalau anak pulang terlalu sore, apalagi kalau harus naik angkutan umum, faktor keamanan jadi perhatian utama.” (OrangTua-02, wawancara 2025)

“Kalau anak pulang sore, otomatis biaya makan bertambah, belum lagi transportasi, ini cukup berat bagi kami.” (OrangTua-08, wawancara 2025)

Data menunjukkan bahwa jumlah siswa di Kota Pematangsiantar mencapai sekitar 90.000 siswa, dengan sekitar 7,20% berasal dari keluarga kurang mampu. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kelompok masyarakat yang rentan terhadap perubahan kebijakan pendidikan, terutama yang berdampak pada peningkatan biaya hidup.

Dalam perspektif ekonomi pendidikan, kebijakan pendidikan dapat memberikan dampak langsung terhadap beban ekonomi keluarga, khususnya pada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (Hanushek & Woessmann, 2020). Oleh karena itu, implementasi kebijakan sekolah lima hari perlu mempertimbangkan aspek keadilan sosial (*social equity*) agar tidak memperlebar kesenjangan pendidikan. Dampak ekonomi kebijakan pendidikan terhadap keluarga juga telah banyak dibahas dalam literatur yang menunjukkan bahwa perubahan kebijakan dapat meningkatkan beban biaya rumah tangga (Hanushek & Woessmann, 2020; Psacharopoulos & Patrinos, 2018)

Selain itu, berkurangnya waktu anak untuk membantu aktivitas keluarga juga menjadi perhatian bagi sebagian orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat, terutama pada keluarga yang masih mengandalkan kontribusi anak dalam aktivitas ekonomi rumah tangga.

Kondisi Demografis dan Akses Transportasi Siswa

Kondisi demografis siswa di Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa sebagian siswa tinggal di wilayah urban maupun suburban, bahkan terdapat siswa yang berasal dari wilayah pinggiran kota. Selain itu, beberapa sekolah juga berada di lokasi yang relatif jauh dari

pusat kota atau berada di wilayah perbatasan. Kondisi geografis ini menunjukkan adanya keragaman akses terhadap fasilitas pendidikan yang dapat mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan sekolah lima hari.

“Ada siswa kami yang rumahnya cukup jauh dari sekolah, bahkan harus ganti angkutan dua kali. Kalau pulang sore, mereka sering kesulitan mendapatkan kendaraan.” (Guru-06, wawancara 2025)

“Anak saya pulang biasanya jam dua siang masih aman, tapi kalau sampai sore, angkutan sudah mulai berkurang dan itu membuat kami khawatir.” (OrangTua-04, wawancara 2025)

Meskipun transportasi umum seperti angkutan kota (angkot) cukup tersedia di Kota Pematangsiantar, jam operasional angkutan tersebut tidak selalu stabil hingga sore hari. Kondisi ini menimbulkan potensi risiko apabila siswa harus pulang sekolah pada waktu pukul 17.00 hingga 18.00. Terbatasnya transportasi pada jam tersebut dapat meningkatkan risiko keamanan bagi siswa yang harus pulang sekolah secara mandiri. Dalam perspektif pembangunan pendidikan berkelanjutan, akses transportasi yang aman merupakan bagian penting dari pemerataan akses pendidikan (Lucas, 2019; Litman, 2020).

Akses transportasi merupakan bagian penting dari dimensi aksesibilitas pendidikan yang berpengaruh terhadap partisipasi dan keamanan siswa (UNESCO, 2022; Litman, 2020; Lucas, 2019)

Temuan ini menunjukkan bahwa akses transportasi merupakan faktor krusial dalam implementasi kebijakan pendidikan, khususnya yang berkaitan dengan perubahan waktu belajar. Dalam perspektif kebijakan pendidikan, aksesibilitas fisik terhadap sekolah merupakan bagian dari dimensi *educational equity*, yang menekankan bahwa setiap siswa harus memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses pendidikan secara aman dan layak (OECD, 2021).

“Kalau anak-anak harus pulang sore, kami harus menjemput, padahal tidak semua orang tua punya waktu atau kendaraan.” (OrangTua-07, wawancara 2025)

“Beberapa siswa memilih menunggu lama di sekolah sampai ada kendaraan, ini juga berisiko karena mereka berada di luar pengawasan.” (Guru-08, wawancara 2025)

Selain itu, keterbatasan akses transportasi juga berkaitan erat dengan aspek keamanan siswa. Penelitian menunjukkan bahwa faktor keamanan dalam perjalanan dari dan ke sekolah merupakan salah satu indikator penting dalam keberhasilan kebijakan pendidikan berbasis waktu (*time-based policy*) (UNESCO, 2022).

Dengan demikian, implementasi kebijakan sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar tidak hanya memerlukan kesiapan institusi pendidikan, tetapi juga membutuhkan dukungan sistem transportasi yang memadai dan aman. Tanpa adanya dukungan tersebut, kebijakan ini berpotensi menimbulkan risiko baru yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keselamatan siswa

Kesiapan Fisik dan Psikologis Siswa

Penerapan sistem sekolah lima hari dengan durasi belajar yang lebih panjang memunculkan pertanyaan mendasar mengenai kesiapan fisik dan psikologis siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Beberapa pakar pendidikan menekankan bahwa durasi belajar yang terlalu panjang dapat berdampak pada menurunnya kemampuan konsentrasi, kelelahan mental, serta penurunan efektivitas pembelajaran.

“Kalau belajar sampai sore, anak-anak biasanya sudah mulai tidak fokus, apalagi di jam-jam terakhir pembelajaran.” (Guru-01, wawancara 2025)

“Anak saya sering mengeluh capek kalau kegiatan sekolah terlalu lama, jadi sulit untuk konsentrasi di rumah saat mengerjakan tugas.” (OrangTua-05, wawancara 2025)

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelelahan belajar yang berlebihan dapat mempengaruhi motivasi belajar serta kesejahteraan emosional siswa (Benabou et al., 2020).

Penelitian oleh Kelley dan Lockley (2020) menunjukkan bahwa aktivitas belajar yang berlangsung dalam durasi panjang tanpa pengelolaan waktu yang efektif dapat menurunkan fungsi kognitif serta retensi belajar siswa. Selain itu, efektivitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis siswa, termasuk tingkat kelelahan, motivasi belajar, dan

kemampuan mempertahankan perhatian dalam jangka waktu tertentu (Darling-Hammond et al., 2020).

Penelitian menunjukkan bahwa durasi belajar yang terlalu panjang tanpa pengelolaan waktu yang baik dapat menyebabkan *cognitive fatigue* dan menurunkan efektivitas pembelajaran (Kelley & Lockley, 2020; OECD, 2023; Dumont et al., 2019). Selain itu, keseimbangan antara aktivitas akademik dan non-akademik merupakan faktor penting dalam perkembangan psikologis siswa (Eccles & Roeser, 2021; Benabou et al., 2020).

Dalam perspektif psikologi pendidikan, kapasitas konsentrasi siswa memiliki batas tertentu yang dipengaruhi oleh usia, kondisi fisik, serta lingkungan belajar (Illeris, 2018). Oleh karena itu, penambahan durasi belajar tanpa disertai dengan strategi pembelajaran yang adaptif berpotensi menimbulkan *cognitive overload*, yang justru dapat menghambat proses pembelajaran.

“Kalau jadwal terlalu padat, siswa cenderung jenuh dan tidak semua materi bisa terserap dengan baik.” (Guru-09, wawancara 2025)

“Anak-anak butuh waktu istirahat dan bermain, kalau terlalu lama di sekolah bisa mempengaruhi suasana hati mereka.” (OrangTua-01, wawancara 2025)

Lingkungan belajar yang terlalu padat juga berpotensi menurunkan efektivitas retensi pembelajaran siswa (Illeris, 2018).

Implikasi ini menjadi lebih kompleks pada siswa jenjang SD dan SMP, yang secara perkembangan psikologis masih berada pada tahap pembentukan kemampuan belajar dan pengelolaan emosi. Eccles dan Roeser (2021) menekankan bahwa keseimbangan antara aktivitas akademik dan kebutuhan perkembangan sosial-emosional merupakan faktor penting dalam mendukung perkembangan optimal siswa.

Dengan demikian, kebijakan sekolah lima hari perlu mempertimbangkan batas kapasitas fisik dan psikologis siswa serta mengintegrasikan pendekatan pembelajaran yang lebih fleksibel, seperti variasi metode pembelajaran, jeda istirahat yang cukup, serta aktivitas non-akademik yang mendukung keseimbangan perkembangan siswa.



Dampak Sosial terhadap Kehidupan Siswa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian siswa di Kota Pematangsiantar memiliki peran sosial tertentu dalam kehidupan keluarga. Beberapa siswa bahkan membantu orang tua dalam aktivitas ekonomi keluarga setelah pulang sekolah. Dalam kondisi normal,

siswa biasanya pulang sekolah sekitar pukul 14.00 dan masih memiliki waktu untuk membantu pekerjaan keluarga atau berpartisipasi dalam kehidupan sosial di lingkungan masyarakat.

“Anak saya biasanya membantu di warung setelah pulang sekolah. Kalau pulang sore, tentu dia tidak bisa lagi membantu seperti biasa.” (OrangTua-09, wawancara 2025)

“Beberapa siswa kami memang punya tanggung jawab di rumah, jadi waktu setelah sekolah itu penting bagi mereka.” (Guru-03, wawancara 2025)

Dengan diterapkannya sistem sekolah lima hari hingga sore hari, terdapat kemungkinan bahwa sebagian siswa kehilangan kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Selain itu, waktu untuk mengembangkan minat dan bakat di luar sekolah juga berpotensi berkurang apabila seluruh aktivitas siswa terserap dalam kegiatan belajar formal di sekolah.

“Kalau sekolah sampai sore, anak-anak jadi jarang ikut kegiatan di lingkungan seperti olahraga atau kegiatan gereja.” (OrangTua-10, wawancara 2025)

“Kami melihat siswa menjadi lebih lelah dan kurang aktif dalam kegiatan sosial di luar sekolah.” (Guru-10, wawancara 2025)

Interaksi sosial di luar sekolah berperan penting dalam pembentukan karakter dan keterampilan sosial siswa (Biesta, 2020; Putnam, 2020; Gershenson et al., 2017)

Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa keseimbangan antara kehidupan akademik dan kehidupan sosial siswa merupakan faktor penting dalam perkembangan psikososial remaja (Eccles & Roeser, 2021). Dalam perspektif sosiologi pendidikan, interaksi sosial di luar sekolah berperan penting dalam membentuk nilai, norma, serta kemampuan adaptasi sosial siswa (Biesta, 2020).

Dengan berkurangnya waktu interaksi di luar sekolah, terdapat potensi penurunan keterlibatan siswa dalam aktivitas sosial masyarakat. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan karakter, empati sosial, serta kemampuan beradaptasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat modern, perubahan kebijakan pendidikan juga berpotensi mempengaruhi modal sosial masyarakat serta pola interaksi sosial peserta didik dalam kehidupan sehari-hari (Putnam, 2020).

Kesiapan Infrastruktur Sekolah

Kesiapan infrastruktur sekolah merupakan salah satu faktor kunci dalam keberhasilan implementasi kebijakan sekolah lima hari. Sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran hingga sore hari idealnya memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kenyamanan dan kesejahteraan siswa selama berada di lingkungan sekolah.

“Kalau kegiatan sampai sore, sekolah harus punya fasilitas yang lengkap, seperti tempat istirahat dan kantin yang memadai.” (Guru-11, wawancara 2025)

“Tidak semua sekolah siap, terutama yang fasilitasnya masih terbatas, apalagi untuk kebutuhan makan siang siswa.” (KepalaSekolah-02, wawancara 2025)

Menurut Haryono (2022), sekolah yang menerapkan sistem pembelajaran hingga sore hari seharusnya memiliki fasilitas seperti ruang istirahat siswa, kantin yang layak, toilet yang bersih dan aman, serta ruang aktivitas siswa. Fasilitas tersebut merupakan bagian dari lingkungan belajar yang mendukung efektivitas pembelajaran. Infrastruktur pendidikan yang memadai berkontribusi terhadap kenyamanan belajar serta kesehatan siswa selama berada di lingkungan sekolah (Barrett et al., 2019; Uline & Tschannen-Moran, 2008).

Namun demikian, tidak semua sekolah di Kota Pematangsiantar memiliki fasilitas tersebut secara memadai. Beberapa sekolah masih menghadapi keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana pendukung pembelajaran.

“Kami belum memiliki ruang khusus untuk siswa beristirahat, jadi kalau kegiatan sampai sore akan cukup sulit bagi siswa.” (Guru-12, wawancara 2025)

“Kantin sekolah juga belum tentu mampu menampung semua siswa jika mereka harus makan siang di sekolah setiap hari.” (OrangTua-11, wawancara 2025)

Dalam perspektif manajemen pendidikan, ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu determinan utama dalam keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan (OECD, 2021). Lingkungan fisik sekolah yang tidak memadai dapat berdampak pada kenyamanan, kesehatan, dan efektivitas belajar siswa (Darling-Hammond et al., 2020). Ketersediaan infrastruktur

pendidikan merupakan salah satu determinan utama dalam kualitas pembelajaran dan kesejahteraan siswa (OECD, 2021; Barrett et al., 2019; Uline & Tschannen-Moran, 2008). Dengan demikian, implementasi kebijakan sekolah lima hari memerlukan kesiapan infrastruktur yang memadai agar tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan siswa. Tanpa dukungan fasilitas yang memadai, kebijakan ini berpotensi menjadi tidak efektif bahkan kontraproduktif terhadap tujuan peningkatan kualitas pendidikan

Analisis Pragmatis Kebijakan Sekolah Lima Hari

Berdasarkan berbagai temuan penelitian, implementasi kebijakan sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar menunjukkan bahwa kebijakan ini tidak dapat dipandang hanya dari perspektif pendidikan semata. Kebijakan ini memiliki implikasi multidimensional yang mencakup aspek pedagogis, sosial, ekonomi, kesehatan, serta keamanan siswa.

“Kebijakan ini sebenarnya tidak hanya soal jam belajar, tetapi juga menyangkut kesiapan lingkungan, keluarga, dan kondisi siswa secara keseluruhan.” (KepalaSekolah-03, wawancara 2025)

“Kami melihat dampaknya bukan hanya di sekolah, tetapi juga pada aktivitas keluarga dan kehidupan sehari-hari siswa.” (TokohMasyarakat-01, wawancara 2025)

Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari sistem sosial yang lebih luas (*education as a social system*), sehingga setiap perubahan kebijakan akan menghasilkan efek domino terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat (UNESCO, 2022; OECD, 2023).

Pendekatan pragmatis dalam analisis kebijakan menekankan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan kondisi nyata di lapangan (*contextual fit*) (Rizvi & Lingard, 2019). Dalam konteks ini, kebijakan sekolah lima hari tidak dapat diimplementasikan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

“Setiap daerah punya kondisi yang berbeda, jadi kebijakan seperti ini sebaiknya tidak disamaratakan.” (PejabatDinas-02, wawancara 2025)

“Kalau dipaksakan tanpa kesiapan, justru bisa menimbulkan masalah baru, terutama bagi siswa dan orang tua.” (Guru-13, wawancara 2025)

Pendekatan pragmatis dalam kebijakan pendidikan menekankan pentingnya kesesuaian antara kebijakan dan konteks sosial masyarakat (Rizvi & Lingard, 2019; Biesta, 2020; Ansell & Torfing, 2021). Pendekatan transdisipliner memungkinkan integrasi berbagai perspektif dalam merumuskan kebijakan publik yang lebih adaptif (Darling-Hammond et al., 2020; OECD, 2023; Cairney, 2019)

Lebih lanjut, kompleksitas faktor yang teridentifikasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan sekolah lima hari membutuhkan pendekatan transdisipliner, yaitu pendekatan yang mengintegrasikan berbagai perspektif keilmuan dalam proses perumusan kebijakan. Pendekatan ini menjadi penting karena permasalahan pendidikan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan pedagogis semata, tetapi juga memerlukan kontribusi dari bidang lain seperti ekonomi, kesehatan masyarakat, transportasi, dan sosiologi pendidikan (Darling-Hammond et al., 2020).

Dalam perspektif manajemen kebijakan publik, pendekatan transdisipliner memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat (Ansell & Torfing, 2021). Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, implementasi kebijakan sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar memerlukan perencanaan yang matang, berbasis data, serta melibatkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan. Tanpa pendekatan yang komprehensif dan kontekstual, kebijakan ini berpotensi tidak mencapai tujuan yang diharapkan, bahkan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap sistem pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat.

DISCUSSION

Penelitian ini menemukan bahwa implementasi kebijakan sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar tidak dapat dipandang sebagai solusi tunggal dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan multidimensional, termasuk kesiapan institusi pendidikan, kondisi sosial ekonomi masyarakat, kesiapan infrastruktur, serta kondisi psikologis dan fisik peserta didik (OECD, 2023; Darling-Hammond et al., 2020).

Selain itu, temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan manajemen waktu pembelajaran tidak memiliki hubungan langsung yang signifikan terhadap peningkatan capaian akademik siswa. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pembelajaran lebih dipengaruhi oleh strategi pedagogis dan kualitas interaksi pembelajaran dibandingkan dengan durasi waktu belajar semata (Hattie, 2020; Blazar & Kraft, 2017). Temuan ini konsisten dengan penelitian internasional yang menunjukkan bahwa kebijakan berbasis waktu (*time-based policy*) tidak selalu berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran tanpa dukungan faktor lain (Morton et al., 2024; Thompson, 2021; Rivkin & Schiman, 2019).

Temuan ini memperkuat teori manajemen pendidikan yang menyatakan bahwa efektivitas pembelajaran tidak ditentukan oleh kuantitas waktu belajar, tetapi oleh kualitas pengelolaan pembelajaran (Fullan, 2020). Dalam konteks ini, kebijakan sekolah lima hari berpotensi menjadi kebijakan administratif apabila tidak diiringi dengan transformasi pedagogis yang signifikan.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Morton et al. (2024) yang menunjukkan bahwa perubahan struktur waktu belajar memiliki dampak yang bervariasi terhadap capaian akademik siswa, tergantung pada konteks implementasi kebijakan. Selain itu, temuan ini memperluas penelitian Thompson (2021) dengan menunjukkan bahwa faktor sosial ekonomi masyarakat memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan faktor administratif dalam keberhasilan kebijakan. Selain itu, pendekatan *contextual policy analysis* menjadi penting karena keberhasilan kebijakan pendidikan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal (Rizvi & Lingard, 2019; Zhao & Watterston, 2021). Temuan penelitian ini juga mendukung pandangan bahwa reformasi pendidikan tidak dapat dilakukan hanya melalui perubahan administratif, tetapi harus diiringi dengan transformasi budaya belajar dan peningkatan kapasitas institusi pendidikan secara menyeluruh (Schleicher, 2020; Fullan, 2020).

Dalam perspektif perkembangan siswa, temuan ini mendukung teori Eccles dan Roeser (2021) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kehidupan akademik dan sosial dalam mendukung perkembangan psikososial siswa.

Dalam perspektif teori kebijakan pendidikan, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kapasitas institusi (Fullan, 2020; Ball, 2017; Cairney, 2019).

Dalam perspektif global, perubahan struktur waktu belajar juga dipengaruhi oleh perkembangan paradigma pendidikan abad ke-21 yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, keseimbangan kehidupan siswa, serta efektivitas proses belajar (Zhao, 2020; Zhao & Watterston, 2021).

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analisis kebijakan yang menggunakan perspektif pragmatis dan transdisipliner dalam memahami implikasi kebijakan sekolah lima hari. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada capaian akademik atau efisiensi operasional, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen waktu pendidikan memiliki implikasi yang lebih luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, kesehatan, transportasi, dan keamanan siswa dalam konteks lokal.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa pentingnya pendekatan *contextual policy analysis* dalam merumuskan kebijakan pendidikan berbasis kondisi sosial masyarakat lokal.

Penelitian ini juga memperkaya literatur tentang *contextual policy analysis* yang menekankan pentingnya pendekatan berbasis konteks lokal dalam kebijakan pendidikan (Rizvi & Lingard, 2019; OECD, 2023).

Kontribusi dari penelitian ini memiliki kontribusi teoritis yaitu memperluas kajian manajemen pendidikan dengan memasukkan pendekatan transdisipliner dalam analisis kebijakan pendidikan. Selain itu penelitian ini memberikan kontribusi Empiris dengan menyediakan data kontekstual mengenai dinamika implementasi kebijakan sekolah lima hari di tingkat daerah. Secara empiris, penelitian ini memperkuat temuan bahwa kebijakan pendidikan bersifat multidimensional dan tidak dapat dipisahkan dari dinamika sosial masyarakat (UNESCO, 2022; Darling-Hammond et al., 2020). Kontribusi Praktis juga terdapat dalam penelitian ini dengan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis data bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif dan kontekstual (OECD, 2021). Penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan collaborative governance dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara aktif (Ansell & Torfing, 2021).

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, tidak menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak kebijakan secara statistik, Jumlah informan yang terbatas sehingga belum merepresentasikan seluruh populasi dan fokus penelitian hanya pada satu wilayah sehingga generalisasi temuan perlu dilakukan secara hati-hati

Berdasarkan temuan penelitian, direkomendasikan bahwa Pemerintah daerah perlu melakukan uji coba kebijakan secara bertahap sebelum implementasi luas, perlu pelibatan aktif guru dan orang tua dalam proses perumusan kebijakan, diperlukan peningkatan infrastruktur sekolah dan sistem transportasi. Penelitian lanjutan menggunakan pendekatan mixed-method sangat diperlukan

Penelitian lanjutan sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman mengenai implikasi kebijakan sekolah lima hari secara lebih komprehensif. Beberapa arah penelitian yang dapat dilakukan antara lain:

1. Menggunakan pendekatan **mixed-method** untuk mengukur dampak kebijakan secara kuantitatif dan kualitatif
2. Mengkaji hubungan antara durasi waktu belajar dan capaian akademik menggunakan analisis statistik yang lebih mendalam
3. Mengembangkan model kebijakan pendidikan berbasis konteks lokal yang dapat diterapkan pada berbagai daerah dengan karakteristik berbeda
4. Mengkaji dampak jangka panjang kebijakan sekolah lima hari terhadap perkembangan sosial dan psikologis siswa
5. Melakukan studi komparatif antar daerah untuk melihat efektivitas implementasi kebijakan dalam konteks yang berbeda

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, transformasi manajemen waktu pendidikan melalui wacana penerapan sistem sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan tidak dapat dipahami hanya dari perspektif pedagogis semata. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian sekolah telah mulai menerapkan sistem sekolah lima hari, sebagian lainnya belum melaksanakannya karena kebijakan tersebut tidak bersifat wajib dan masih bergantung pada kesiapan masing-masing satuan pendidikan. Selain itu, kondisi capaian belajar siswa di Kota Pematangsiantar juga belum menunjukkan peningkatan yang signifikan yang dapat secara langsung dikaitkan dengan perubahan sistem waktu belajar di sekolah.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kesiapan berbagai pemangku kepentingan terhadap implementasi kebijakan sekolah lima hari masih beragam. Guru sebagai pelaksana utama proses pembelajaran cenderung berada dalam posisi pasif terhadap wacana kebijakan tersebut, sementara sebagian orang tua siswa juga menunjukkan sikap yang relatif pasif karena merasa bahwa pandangan mereka tidak menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan kebijakan pendidikan. Di sisi lain, terdapat pula kekhawatiran dari sebagian orang tua terkait aspek keamanan siswa, peningkatan biaya kebutuhan harian, serta berkurangnya waktu interaksi sosial siswa di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain aspek pendidikan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sekolah lima hari berpotensi memberikan dampak terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Faktor-faktor seperti kondisi sosial ekonomi keluarga siswa, keterbatasan akses transportasi pada waktu sore hari, kesiapan fisik dan psikologis siswa dalam mengikuti jam belajar yang lebih panjang, serta kesiapan infrastruktur sekolah menjadi aspek penting yang perlu dipertimbangkan secara komprehensif. Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan transformasi manajemen waktu pendidikan merupakan kebijakan yang memiliki implikasi multidimensional yang memerlukan pendekatan analisis yang bersifat transdisipliner.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, implikasi kebijakan yang dapat ditarik adalah bahwa penerapan sistem sekolah lima hari di Kota Pematangsiantar sebaiknya tidak dilakukan secara seragam tanpa mempertimbangkan kesiapan masing-masing sekolah dan kondisi sosial masyarakat setempat. Pemerintah daerah perlu melakukan kajian kebijakan yang lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pakar pendidikan, pakar kesehatan, pakar transportasi, Pendekatan kebijakan berbasis konteks lokal menjadi penting agar kebijakan pendidikan mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung pembangunan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan (UNESCO, 2022; Rizvi & Lingard, 2019). serta perwakilan masyarakat. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan kesiapan infrastruktur sekolah, sistem transportasi siswa, serta dukungan kebijakan yang mampu meminimalkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin muncul akibat perubahan sistem waktu belajar di sekolah.

Sebagai rekomendasi, penelitian ini menyarankan agar pemerintah daerah Kota Pematangsiantar melakukan kajian kebijakan berbasis data dan melibatkan pendekatan transdisipliner sebelum mengimplementasikan kebijakan sekolah lima hari secara lebih luas. Selain itu, diperlukan mekanisme partisipasi publik yang lebih terbuka agar guru, orang tua siswa, dan masyarakat dapat memberikan masukan dalam proses perumusan kebijakan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan transformasi manajemen waktu pendidikan yang diambil tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat serta mendukung keberlanjutan sistem pendidikan di Kota Pematangsiantar. Dengan demikian, transformasi manajemen waktu pendidikan perlu dipahami sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang bersifat sistemik dan kontekstual, bukan sekadar perubahan administratif pada struktur waktu belajar siswa (Schleicher, 2020; Fullan, 2020; OECD, 2023).

REFERENCES

- Anderson, K. P., & Walker, T. (2020). Does shortened school week impact student performance? *Economics of Education Review*, 75, 101979. <https://doi.org/10.1016/j.econedurev.2020.101979>
- Baker, B. D., Farrie, D., & Sciarra, D. G. (2018). Is school funding fair? *Educational Policy Analysis Archives*, 26(1), 1-35. <https://doi.org/10.14507/epaa.26.3243>
- Borman, G. D., & Dowling, N. M. (2019). Schools and inequality. *Teachers College Record*, 121(3), 1-40.
- Carrell, S. E., & Hoekstra, M. (2019). Externalities in the classroom. *American Economic Journal: Applied Economics*, 11(3), 1-28. <https://doi.org/10.1257/app.20170406>
- Cortes, K. E., & Goodman, J. S. (2021). Ability-tracking, instruction time, and better pedagogy. *Journal of Public Economics*, 198, 104390. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2021.104390>
- Dee, T. S., & Wyckoff, J. (2018). Incentives, selection, and teacher performance. *Journal of Policy Analysis and Management*, 37(3), 595-620. <https://doi.org/10.1002/pam.22055>
- García, E., & Weiss, E. (2017). Education inequalities at the school starting gate. *Economic Policy Institute*.
- Greene, J. P., & Paul, J. D. (2018). The impact of school choice on student outcomes. *Educational Researcher*, 47(6), 327-336. <https://doi.org/10.3102/0013189X18785632>
- Hanushek, E. A. (2020). Education production functions. *Journal of Economic Literature*, 58(1), 1-50. <https://doi.org/10.1257/jel.20191412>

- Harris, D. N. (2020). The effect of school time on achievement. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 42(3), 357–381. <https://doi.org/10.3102/0162373720931909>
- Jackson, C. K. (2018). What do test scores miss? *Journal of Political Economy*, 126(5), 1–40. <https://doi.org/10.1086/699447>
- Kraft, M. A. (2019). Interpreting effect sizes. *Educational Researcher*, 48(4), 241–253. <https://doi.org/10.3102/0013189X19842663>
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership. *School Leadership & Management*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1080/13632434.2019.1596077>
- Lavy, V. (2020). Do differences in schools' instruction time explain achievement gaps? *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(3), 1–35. <https://doi.org/10.1257/app.20180611>
- Marcotte, D. E., & Hemelt, S. W. (2018). Unscheduled school closings. *Education Finance and Policy*, 13(1), 1–30. https://doi.org/10.1162/EDFP_a_00212
- Muralidharan, K., Singh, A., & Ganimian, A. J. (2019). Disrupting education? *American Economic Review*, 109(4), 1–40. <https://doi.org/10.1257/aer.20171112>
- OECD. (2019). *PISA 2018 results*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/5f07c754-en>
- OECD. (2020). *Education at a glance 2020*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/69096873-en>
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education. *Education Economics*, 26(5), 445–458. <https://doi.org/10.1080/09645292.2018.1484426>
- Rivkin, S. G., Hanushek, E. A., & Kain, J. F. (2018). Teachers, schools, and academic achievement. *Econometrica*, 73(2), 417–458. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0262.2005.00584.x>
- Robinson, V. M. J. (2018). Reduce change to increase improvement. *Educational Management Administration & Leadership*, 46(1), 5–19. <https://doi.org/10.1177/1741143216662497>
- Scheerens, J. (2018). Educational effectiveness and inequality. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-71448-0>
- Schleicher, A. (2018). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing.
- Steinberg, M. P. (2020). Does greater autonomy improve school performance? *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 42(2), 1–28. <https://doi.org/10.3102/0162373719899943>
- Suryadarma, D., & Jones, G. W. (2019). *Education in Indonesia*. ISEAS Publishing.
- UNICEF. (2021). *The state of the world's children*. UNICEF Publishing.
- UNESCO. (2021). *Global education monitoring report*. UNESCO Publishing.
- Woessmann, L. (2020). The economic case for education. *Education Economics*, 28(1), 1–22. <https://doi.org/10.1080/09645292.2019.1649279>
- Zhang, Y., & Campbell, R. (2021). School time and student outcomes. *Educational Review*, 73(5), 1–20. <https://doi.org/10.1080/00131911.2020.1787951>
- Ansell and Torfing's Public Governance Paradigms Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance paradigms: Policy making and administration in transition*. Edward Elgar Publishing.
- Ball, Stephen J. Ball, S. J. (2017). *The education debate* (3rd ed.). Policy Press.
- Barrett, P., Treves, A., Shmis, T., Ambasz, D., & Ustinova, M. (2019). *The impact of school infrastructure on learning*. World Bank.
- Benabou, Roland Benabou, R., Falk, A., & Tirole, J. (2020). Narratives, imperatives, and moral reasoning. *Annual Review of Economics*, 12(1), 511–538.
- Biesta, Gert Biesta, G. (2020). *Risking ourselves in education: Qualification, socialization, and subjectification revisited*. *Educational Theory*, 70(1), 89–104.
- Blazar, David Blazar, D., & Kraft, M. A. (2017). Teacher and teaching effects on students' attitudes and behaviors. *Educational Evaluation and Policy Analysis*, 39(1), 146–170.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101.
- Cairney, P. (2019). *Understanding public policy: Theories and issues*. Red Globe Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.

- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design* (4th ed.). Sage Publications.
- Darling-Hammond, L., Flook, L., Cook-Harvey, C., Barron, B., & Osher, D. (2020). Implications for educational practice of the science of learning and development. *Applied Developmental Science, 24*(2), 97–140.
- Denzin, N. K. (2017). *The research act: A theoretical introduction to sociological methods*. Routledge.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage handbook of qualitative research* (5th ed.). Sage Publications.
- Dumont, H., Istance, D., & Benavides, F. (2019). *The nature of learning: Using research to inspire practice*. OECD Publishing.
- Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2021). Schools as developmental contexts during adolescence. *Journal of Research on Adolescence, 31*(2), 287–305.
- Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). Sage Publications.
- Fullan, Michael Fullan, M. (2020). *Leading in a culture of change* (2nd ed.). Jossey-Bass.
- Gershenson, S., Holt, S. B., & Papageorge, N. W. (2017). Who believes in me? The effect of student-teacher demographic match on teacher expectations. *Economics of Education Review, 52*, 209–224.
- Hallinger, P., & Chen, J. (2021). Leadership and teacher learning in Asia. *Educational Management Administration & Leadership, 49*(2), 187–205.
- Hanushek, E. A., & Woessmann, L. (2020). *The knowledge capital of nations*. MIT Press.
- Hattie, John Hattie, J. (2020). *Visible learning: Feedback*. Routledge.
- Haryono. (2022). Manajemen sarana dan prasarana pendidikan dalam pembelajaran full day school. *Jurnal Manajemen Pendidikan Indonesia, 14*(2), 145–158.
- Illeris, K. (2018). *Contemporary theories of learning*. Routledge.
- Kelley, P., & Lockley, S. W. (2020). Synchronizing education to adolescent biology. *Learning, Media and Technology, 45*(1), 5–17.
- Kidger, J., Brockman, R., Tilling, K., Campbell, R., Ford, T., Araya, R., ... & Gunnell, D. (2018). Teachers' wellbeing and depressive symptoms. *Journal of Affective Disorders, 242*, 34–41.
- Kim, Y., & Hill, N. E. (2015). Including fathers in the picture. *Journal of Educational Psychology, 107*(4), 919–934.
- Leithwood, K., Harris, A., & Hopkins, D. (2020). Seven strong claims about successful school leadership revisited. *School Leadership & Management, 40*(1), 5–22.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Sage Publications.
- Litman, T. (2020). Transportation and public health. *Annual Review of Public Health, 41*, 21–36.
- Lucas, K. (2019). Transport and social exclusion. *Transport Policy, 20*(1), 105–113.
- Maxwell, J. A. (2017). *Qualitative research design*. Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative data analysis* (4th ed.). Sage Publications.
- Morton, E., Thompson, P., & Kuhfeld, M. (2024). The effects of four-day school weeks on student achievement. *Educational Researcher, 53*(1), 14–27.
- Nguyen, D., Harris, A., & Ng, D. (2020). A review of teacher leadership. *Educational Management Administration & Leadership, 48*(1), 60–80.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis. *International Journal of Qualitative Methods, 16*(1), 1–13.
- Organisation for Economic Co-operation and Development OECD. (2021). *Education policy outlook 2021*. OECD Publishing.
- Patall, E. A., Cooper, H., & Allen, A. B. (2018). Extending the school day or school year. *Review of Educational Research, 80*(3), 401–436.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). Sage Publications.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2018). Returns to investment in education. *Education Economics, 26*(5), 445–458.
- Putnam, R. D. (2020). *The upswing: How America came together a century ago and how we can do it again*. Simon & Schuster.

- Rivkin, S. G., & Schiman, J. C. (2019). Instruction time, classroom quality, and academic achievement. *The Economic Journal*, 125(588), F425–F448.
- Rizvi, F., & Lingard, B. (2019). *Globalizing education policy* (2nd ed.). Routledge.
- Spillane, J. P. (2017). *Distributed leadership*. Jossey-Bass.
- Strauss, A., & Corbin, J. (1998). *Basics of qualitative research*. Sage Publications.
- Terry, G., Hayfield, N., Clarke, V., & Braun, V. (2017). Thematic analysis. In *The Sage handbook of qualitative research in psychology* (pp. 17–37). Sage Publications.
- Thompson, P. N. (2021). What is gained and lost with a four-day school week? *Economics of Education Review*, 80, 102068.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods*. Wiley-Blackwell.
- Tummers, L., Bekkers, V., Vink, E., & Musheno, M. (2015). Policy alienation of public professionals. *Public Management Review*, 17(5), 735–764.
- Uline, C., & Tschannen-Moran, M. (2008). The walls speak. *Journal of Educational Administration*, 46(1), 55–73.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. (2022). *Global education monitoring report 2022*. UNESCO Publishing.
- Wilder, S. (2017). Effects of parental involvement on academic achievement. *Educational Review*, 66(3), 377–397.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). Sage Publications.
- Zhao, Y. (2020). *Learners without borders*. Corwin Press.
- Biesta, G., & Tedder, M. (2019). Agency and learning in education. *Studies in the Education of Adults*, 38(2), 132–149.
- Hargreaves, A., & Fullan, M. (2020). *Professional capital after the pandemic*. Teachers College Press.
- Sahlberg, P. (2021). *Finnish lessons 3.0*. Teachers College Press.
- Schleicher, A. (2020). *World class: How to build a 21st-century school system*. OECD Publishing.
- Zhao, Y., & Watterston, J. (2021). The changes we need. *Journal of Educational Change*, 22(1), 3–12.
- Biesta, G. (2021). Educational research. *British Educational Research Journal*, 47(1), 12–28.